

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 - 2021

Elis¹⁾
rrsabam@gmail.com

Agus Munandar²⁾
agus.munandar@esaunggul.ac.id

¹⁾²⁾ Universitas Esa Unggul

ABSTRAK

Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa suatu parameter pada saat dilakukannya ukuran hasil kerja dalam mengelola keuangan daerah. Analisis kerja keuangan dihitung melalui rasio efisiensi, pertumbuhan, efektifitas dan ketidakbergantungan keuangan daerah. Penelitian ini ditujukan agar dapat melakukan pengukuran kerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 - 2021. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian pada penelitian ini. Hasil penelitian memiliki hasil berupa, rasio efektifitas terkategori sangat optimal, rasio efisiensi dilakukan kurang efisien, rasio kemandirian dalam mengelola keuangan daerah tinggi dan rasio dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh sangat baik.

Kata kunci: Laporan Keuangan, APBD, LKPD

PENDAHULUAN

Kabupaten Tanjung Jabung Timur ialah sebuah Kabupaten paling timur pada Provinsi Jambi dengan Ibukota Muaro Sabak. Kabupaten ini dihasilkan berdasarkan pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung. Sebagai salah satu kabupaten, Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus menyusun laporan keuangan pada akhir satu tahun anggaran sebagai ukuran pertanggungjawaban keuangan yang dikelola daerah. Pemerintah Daerah yaitu sistem yang diselenggarakan pada tingkat daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki unsur penyelenggara meliputi Bupati, Gubernur, Walikota serta perangkat daerah. Pemerintah daerah menangani keuangan daerah APBD dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan penyelenggaraan pemerintahan. UU No. 17 Tahun 2003 bahwa Keuangan Negara menyatakan laporan tanggung jawab keuangan diartikan dengan harus disajikan pada bentuk Laporan Keuangan sedikitnya berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan dari Laporan Keuangan, Laporan Kas, kemudian disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan pertanggungjawaban keuangan ini disusun berdasar pada peraturan yang ditetapkan dalam menentukan apakah organisasi telah memenuhi tanggung jawabnya secara efektif atau tidak. Laporan keuangan dilakukan analisis agar dapat menilai dan melihat kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ketika laporan keuangan dilakukan analisis melibatkan interpretasi berbagai angka pada laporan keuangan dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan, hasil penelitian dapat berfungsi sebagai landasan untuk keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Kawatu, 2019).

Suatu wujud dari tanggung jawab pemerintahan daerah pada saat mengelola APBD berupa melalui diadakannya perwujudan kualitas dari LKPD Pemerintah Kabupaten atau Kota dan Provinsi wajib melaporkan laporan keuangan untuk tanggung jawab sesudah tahun anggaran berakhir kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disebut berkualitas apabila pada saat diperiksa hasil dari laporan keuangan memperoleh Opini Wajar dengan tanpa terkecuali. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan penyusunan agar informasi relevan dapat tersedia tentang posisi keuangan dari sebuah periode pelaporan. Tujuan utama laporan keuangan adalah melakukan perbandingan realisasi pemasukan, transfer, melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi sebuah entitas laporan, anggaran belanja, biaya anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, melakukan penilaian keadaan keuangan, beserta membantu dalam penentuan ketaatan pada aturan undang-undang. LKPD memiliki tujuan umum berupa menyediakan informasi untuk yang menggunakannya tentang: 1. Petunjuk mengenai sumber daya yang sudah digunakan serta didapat berdasarkan anggaran; beserta 2. Petunjuk mengenai sumber daya yang digunakan serta didapat berdasarkan pada ketentuan, termasuk batas anggaran yang DPRD tetapkan.

Penelitian ini disusun dalam rangka mengetahui dan memahami Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 - 2021. Berdasarkan penelitian yang sudah dijalankan, hasilnya diharapkan akan memberi manfaat pada pengambilan keputusan oleh pihak internal Pemkab Tanjung Jabung Timur dan masyarakat luas sebagai pihak eksternal.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

Laporan keuangan ialah laporan yang memperlihatkan kegiatan keuangan beserta kinerja bisnis. Pengertian lain dari laporan keuangan ialah sekelompok laporan besar dengan merangkum kinerja keuangan, kondisi keuangan, serta arus kas organisasi. Laporan keuangan dihasilkan dengan memanfaatkan fakta tentang kejadian keuangan yang dicatat dalam urutan kronologis. International Financial Reporting Standards (IFRS) menjelaskan satu set lengkap laporan keuangan diantaranya: laporan keuangan yang terletak diakhir periode; laporan

untung rugi serta penerimaan komprehensif lain-lain untuk periode tersebut; laporan ekuitas yang berubah; catatan dari laporan keuangan, beserta arus kas.

Laporan keuangan berfungsi untuk alat membuat serta menilai tentang keputusan pengalokasikan sumber daya dengan memberikan informasi tentang status dilaksanakannya anggaran, keuangan entitas pelapor, hasil kerja keuangan, dan arus kas. Selain itu, laporan keuangan bertujuan umum memiliki fungsi-fungsi yang dapat diprediksi dan terdapat prospeknya dengan melakukan penawaran data yang dapat digunakan dalam melakukan hipotesis total sumber daya sehingga diperlukan dalam kegiatan yang sedang berjalan, sumber daya yang dihasilkan oleh operasi yang sedang berlangsung, serta resiko yang tidak pasti terkait dengan sumber daya tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKPD melaporkan posisi keuangan (aset beserta kewajiban) dan kegiatan keuangan (pendapatan dan belanja) pemerintah daerah yang sebenarnya dan tahun sebelumnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ialah tentang keputusan pendapatan serta pengeluaran pemerintah daerah. Ini mencakup sumber pendapatan yang digunakan oleh pemerintah daerah seperti pajak (misalnya properti, pendapatan, penjualan), biaya pengguna, dan transfer antar pemerintah. Dengan sistem akuntansi yang diatur UU dan aturan pemeritahan yang terhubung pada semua aspek pemerintahan daerah, maka pemerintahan daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban. LKPD ialah bentuk ideal akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah (Lativa Ulisanti, 2021). LKPD yang berkualitas menggambarkan seberapa baik pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangan mereka untuk mendanai program. LKPD yang berkualitas harus disusun berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yang menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPD yang berkualitas harus sesuai, handal, dapat dibandingkan, relevan, dan dimengerti. Data menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah yang gagal menghadirkan akuntabel dan LKPD yang berkualitas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan banyak kesalahan dan kecurangan di laporan keuangan pemerintah daerah. Catatan dari BPK meliputi aspek-aspek seperti pengelolaan dan inventarisasi aset lokal, keterlambatan laporan terkait pengeluaran, dan laporan pendapatan rendah dari dinas setempat (Lativa Ulisanti, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif pada pendekatan kualitatif serta analisis kepustakaan atau studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metodologi penelitian dengan mempelajari jurnal, buku, artikel, tesis, serta referensi berhubungan pada LKPD (Sugiyono, 2022). Penelitian ini bertujuan dalam mendapatkan deskripsi mengenai perkembangan kinerja keuangan daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi. Penelitian dengan obyek penelitian Pemda Kabupaten Tanjabtim ini menggunakan data sekunder. Data sekundernya ialah data keuangan APBD Kabupaten Tanjabtim Tahun Anggaran 2017 - 2021. Data-data didapatkan dikumpulkan dengan cara dokumentasi.

PEMBAHASAN

Menentukan kinerja keuangan pemerintahan daerah dari LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 dapat menggunakan beberapa rasio kinerja keuangan diantaranya : rasio efisiensi, efektivitas, pertumbuhan, beserta kemandirian. Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjabtim Tahun 2017 - 2021.

Tabel 1. Realisasi APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 - 2021 (dalam miliar rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN				
		REALISASI 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2019	REALISASI 2018	REALISASI 2017
A	PENDAPATAN	1.163,13	1.052,61	1.195,75	1.093,50	1.081,02
1	Pendapatan Asli Daerah	81,60	49,65	53,92	49,61	76,78
2	Pendapatan Transfer	1.050,09	966,00	1.109,95	1.043,66	995,41
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	31,44	36,96	31,88	0,23	8,83
B	BELANJA	1.049,21	1.095,36	1.188,86	1.133,47	1.047,21
1	Belanja Operasional	673,63	682,29	705,59	682,46	637,59
2	Belanja Modal	229,95	229,23	328,87	312,96	275,10
3	Belanja Tak Terduga	0,28	36,94	0,78	0,21	1,00
4	Transfer	145,35	146,91	153,61	137,84	133,52
	Surplus / Defisit	113,92	-42,76	6,89	-39,97	33,82

Sumber : tanjabtimkab.go.id

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah mendeskripsikan mengenai kemampuan pemerintah daerah pada saat merencanakan penerimaan dengan melakukan realisasi dan perbandingan pada target PAD yang dilakukan penetapan dari potensi riil daerah. Tingkat keefektifan kemampuan tersebut dinyatakan pada rasio efektifitas yang dicapai minimum 100%.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Efektivitas PAD	Kriteria
Diatas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 - 99	Cukup Efektif
75 - 89	Kurang Efektif
Dibawah 75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019)

Menghitung rasio efektivitas dengan melalui perbandingan antar realisasi penerimaan dan target atau anggaran yang dilakukan penetapan dikali dengan 100%.

Tabel 3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Tanjabtim Tahun 2017 - 2021

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Rasio Efektifitas	Kriteria
2021	1.163.129.937.038,75	1.089.315.889.549,00	106,78%	Sangat Efektif
2020	1.052.605.269.951,01	1.060.401.195.432,59	99,26%	Cukup Efektif
2019	1.195.747.773.012,10	1.196.852.312.992,03	99,91%	Cukup Efektif
2018	1.093.500.510.955,44	1.083.172.878.144,06	100,95%	Efektif
2017	1.081.024.450.749,69	1.027.830.341.140,00	105,18%	Sangat Efektif

Sumber : data diolah

Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah mendeskripsikan berapa banyak pembiayaan untuk pengeluaran dalam menghasilkan pendapatan dengan jumlah sebenarnya dari hasil pendapatan. Apabila rasio < 1 ataupun $< 100\%$, maka kinerja pemerintahan daerah pada penghimpunan dana dianggap efisien. Jika rasio efisiensi yang makin kecil, maka kinerja pemerintahan daerah makin baik.

Tabel 4. Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kinerja
Kurang dari 60 %	Sangat Efisien
60 % - 80 %	Efisien
80 % - 90 %	Cukup Efisien
90 % - 100 %	Kurang Efisien
Diatas 100 %	Tidak Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Rumusan untuk menghitung efisiensi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah dilakukan perumusan dengan membandingkan realisasi belanja ataupun belanja anggaran melalui realisasi penerimaan daerah dikali 100%. Jika rasio diperoleh < 1 ataupun $< 100\%$, maka kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dianggap efisien.

Tabel 5. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tanjabtim Tahun 2017 - 2020

Tahun Anggaran	Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kriteria
2021	1.049.205.104.374,18	1.163.129.937.038,75	90,21%	Cukup Efisien
2020	1.095.361.651.538,17	1.052.605.269.951,01	104,06%	Tidak Efisien
2019	1.188.855.416.731,04	1.195.747.773.012,10	99,42%	Kurang Efisien
2018	1.133.467.029.869,60	1.093.500.510.955,44	103,65%	Tidak Efisien
2017	1.047.207.797.042,00	1.081.024.450.749,69	96,87%	Kurang Efisien

Sumber : data diolah

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah ruang lingkup keuangan kedaerahan dengan dilakukannya pengelolaan APBD secara langsung serta kekayaan daerah BUMD dipisahkan (Halim, 2014). Keuangan daerah memperlihatkan bahwa kemandirian pemerintah daerah mampu melakukan pendanaan aktivitas sendiri, pembangunan serta layanan pemerintahan pada masyarakat yang sudah melakukan pembayaran pajak beserta kontribusi untuk keperluan sumber penerimaan. Rasio kemandirian ini mendeskripsikan bahwa tidak bergantungnya daerah terhadap sumber pendanaan eksternal.

Tabel 6. Kriteria Penilaian Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubungan
>75 % - 100 %	Tinggi	Delegatif
>50 % - 75 %	Sedang	Partisipatif
>25 % - 50 %	Rendah	Konsultatif
>0 % - 25 %	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : Maulina & Rhea (2019)

Indikator kemandirian keuangan sebuah daerah ialah rasio PAD terhadap Dana Perimbangan beserta pinjaman (Oktalina, 2020).

Tabel 7. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanjabtjm Tahun 2017 – 2120

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2021	81.601.471.901,75	1.081.528.465.137,00	7,55%	Instruktif
2020	49.646.511.512,85	1.002.958.758.438,16	4,95%	Instruktif
2019	53.919.302.033,20	1.141.828.470.978,90	4,72%	Instruktif
2018	49.607.102.060,03	1.043.893.408.895,41	4,75%	Instruktif
2017	76.775.700.725,52	1.004.248.750.024,17	7,65%	Instruktif

Sumber : data diolah

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah dalam menentukan pertumbuhan pemerintah daerah apakah mengalami pertumbuhan positif atau negatif selama periode tahun anggaran. Mengukur besarnya pemerintah daerah mampu pada pertahanan dalam melakukan peningkatan keberhasilan yang sudah dicapainya berdasarkan satu periode menuju periode selanjutnya. Tujuannya dalam melakukan pengukuran besaran antar unsur pendapatan serta pengeluaran maka dipergunakan dalam melakukan penilaian kesanggupan yang lebih berprioritas dalam memperoleh perhatian.

Tabel 8. Persentase Pertumbuhan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjabtjm Tahun 2017 – 2120

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan	Growth
2021	1.163.129.937.038,75	110,50%
2020	1.052.605.269.951,01	88,03%
2019	1.195.747.773.012,10	109,35%
2018	1.093.500.510.955,44	101,15%
2017	1.081.024.450.749,69	-

Sumber : data diolah

Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjabtjm menunjukkan pertumbuhan yang positif.

KESIMPULAN

1. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Tanjabtim Tahun Anggaran 2017 – 2021 rata-rata sebesar 102,42 % yang berarti sangat efektif. Pemda Kabupaten Tanjabtim mampu merealisasikan PAD yang ditargetkan bahkan melebihi capaiannya. Pemda Kabupaten Tanjabtim sangat efektif dalam mewujudkan pendapatan yang direncanakan dari potensi riil daerah.
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tanjabtim Tahun Anggaran 2017 – 2021 rata-rata sebesar 98,84 % yang berarti kurang efisien. Pemda Kabupaten Tanjabtim kurang efisien dalam mengeluarkan biaya untuk mengumpulkan pendapatan daerah. Menggambarkan bahwa Pemda Kabupaten Tanjabtim meningkatkan biaya pengumpulan PAD untuk menghasilkan output penerimaan sekaligus mendeskripsikan efisiensi dikelolanya sistem keuangan kedaerahan yang belum optimal.
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemda Kabupaten Tanjabtim Tahun Anggaran 2017 – 2021 rata-rata sebesar 5,92 % yang berarti kemandirian yang sangat tinggi. Pemda Tanjabtim berhasil dengan baik membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah.
4. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjabtim Tahun Anggaran 2017 – 2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yang berarti Pemda Kabupaten Tanjabtim berhasil melakukan pemulihan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan setelah dua tahun pandemi Covid-19, terlihat pada pertumbuhan tahun 2021 sebesar 110,50% dari sebelumnya tahun 2020 sebesar 88,03%. Peningkatan yang sangat signifikan menunjukkan Pemda Kabupaten Tanjabtim mampu mendongkrak dan menggerakkan ekonomi daerah dan menciptakan pertumbuhan yang berhasil baik.

REFERENSI

- Depdagri.1997.Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis laporan keuangan sektor publik*. Deepublish.
- Lativa Ulisanti, A. (2021). Human resource competence as a moderating variable for the quality of local government financial reports. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 2021(2), 505–518.
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. STIM YKPN.
- Maulina, F., & Rhea. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal OBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 11–22.
<https://jurnal.polteq.ac.id/index.php/obis/article/download/30/12>
- Oktalina, G. (2020). Analysis of regional financial performance through the independence ratio, effectiveness ratio, and growth ratio in the district south bangka. *International Journal of Finance Research*, 1(2), 60–73.
<https://doi.org/10.47747/financeinvestmentderivative.v1i2.99>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Bandung : Alfabeta.